



TAHUN 2022

RENCANA KERJA PERUBAHAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
LAMONGAN**



sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2022.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Tahun 2022, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Lamongan, Juli 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAOMONGAN



PUJO BROTO IRWAN PUTRA, SE.,MM.,M.Kes

Pembina Utama Muda
NIP. 19691008 199503 1 003



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD sehingga penyusunan Renja SKPD berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA DPMPTSP Kabupaten Lamongan mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Lamongan, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA SKPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan visi, misi, dan program SKPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2022;
3. RENJA SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD.



1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Lamongan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026; dan
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 81 Tahun 2020 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Lamongan Tahun 2022 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Tahun 2021 dan perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2022.



1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2022 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan RENJA Perubahan DPMPTSP Kabupaten Lamongan Tahun 2022 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI DPMPTSP KABUPATEN LAMONGAN TAHUN LALU (TAHUN 2021)

Bab ini memuat :

- 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Lamongan Tahun 2021 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Lamongan Tahun 2021
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten



Lamongan

- 2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Lamongan
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KABUPATEN LAMONGAN

Bab ini memuat :

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Lamongan tahun 2022
- 3.3 Program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Lamongan tahun 2021

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KABUPATEN LAMONGAN

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat :

- a. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah – kaidah Pelaksanaan
- c. Rencana Tindak Lanjut



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP KABUPATEN LAMONGAN SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Lamongan Tahun 2021 dan Capaian tahun berjalan s/d Tribulan II pada DPMPTSP Kabupaten Lamongan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2021 dan perkiraan capaian s/d Triwulan II tahun 2022 sebagaimana Tabel T-C. 2. 1



Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2022

Renja Perubahan DPM-PTSP 2022



RENJA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	01	2.02	01	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	27 Orang	27 org	27 Orang	100%	27 Orang	27 Orang	
2	18	01	2.02	06	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	
							Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	3 Dokumen	3 dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	0	
2	18	01	2.02	07	07	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/tribulan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja semesteran akhir tahun	1 Dokumen	1 dokumen	3 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	
2	18	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang dipenuhi	2 Administrasi	2 Administrasi	2 Administrasi	100%	2 Administrasi	0	
2	18	01	2.05	02	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	56 Stel	56 Stel	56 Stel	10%	56 Stel	0	
2	18	01	2.05	09	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang	9 orang	9 Orang	22%	2 Orang	0	
2	18	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang dipenuhi	6 Administrasi	6 Administrasi	6 Administrasi	100%	6 Administrasi	5 Administrasi	
2	18	01	2.06	01	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik	22 Item	15 item	15 item	100%	22 Item	16 item	
2	18	01	2.06	03	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dipenuhi	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100%	6 Jenis	3 Jenis	
2	18	01	2.06	04	04	Penyediaan bahan logistik kator	Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor	4 Jenis	69 Jenis	69 Jenis	100%	4 Jenis	4 Jenis	



RENJA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan	5 Jenis	15000 Lembar dan 5 Jenis	15000 Lembar dan 5 Jenis	100%	5 Jenis	5 Jenis	
2	18	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	8 Media	8 Media	100%	100%	8 Media	8 Media	
2	18	01	2.06	09	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah/luar daerah	62 Perjalanan	124 kali	124 kali	100%	62 Perjalanan	8	Perjalanan
						Jumlah makanan dan minuman	5 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	100%	5 Jenis	5 Jenis	
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan	2 Jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 Jenis	0	
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Meber	Jumlah pengadaan meubelair	4 Set	1 set	1 set	0%	4 Set	0	
2	18	01	2.07	06	Penyediaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan perlengkapan kantor, computer, notebook, printer	1 Software	1 Buah PC dan 1 Buah Printer	1 Buah PC dan 1 Buah Printer	0%	1 Software	0	
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 Jenis	3 Jenis	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	4 Rekening	4 rekening	4 rekening	100%	4 Rekening	4 Renening	
2	18	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa perlengkapan dan peralatan kantor	3 Jenis	40 buah	40 buah	100%	3 Jenis	3 Jenis	
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi	16 Orang	15 Orang	15 Orang	100%	16 Orang	16 Orang	
						Jumlah tenaga kebersihan, pengamanan, petugas parkir dan pemengudi	11 Orang	11 Orang	11 Orang	100%	11 Orang	11 Orang	



RENJA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Barang yang dipelihara	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Jenis	4 Jenis	
2	18	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	2 Unit	5 Mobil	100%	5 Mobil	2 Unit	2 Unit
					Jumlah motor jabatan yang dipelihara	11 Unit	11 Motor	100%	11 Motor	5 Unit	
2	18	01	2.09	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	1 Unit	
2	18	01	2.09	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	20 Unit	20 Unit	100%	20 Unit	10 Unit	
					Jumlah perlengkapan yang dipelihara	20 Unit	20 Unit	100%	20 Unit	20 Unit	
2	18	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	2 Gedung	2 gedung	100%	2 gedung	2 Gedung	
2	18	02		Program PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase Peningkatan Minat Investasi	66.2%	4%	100%	4%	16%	
2	18	02	2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten atau Kota	Jumlah Fasilitas/Insentif Penanaman Modal yang diberikan	35 %	35 %	100%	35 %	30%	
2	18	02	2.01	Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas / insentif dan kemudahan penanaman modal	Dokumen pemberian fasilitas/insentif PM	1 Dokumen	35 Peserta	100%	35 Peserta	0	
2	18	02	2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi	35%	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	30%	
2	18	02	2.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Jumlah Peta Data Potensi Investasi yang dikembangkan	1 Updating Data	27 Kecamatan	100%	27 Kecamatan	0	Dalam Proses



RENJA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Peningkatan Investor Penanaman Modal	100%	4%	4%	4%	100%	100%	93%	
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Promosi yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Strategi Penanaman Modal	1 Dokumentasi/Fil m	50 Buku	50 Buku	50 Buku	100%	1 Dokumen tasi/Film	1 Dokumenta si	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah Kabupaten / Kota	Kegiatan penyelenggaraan pameran Investasi	2 Kali	135 Pengunjun g	135 Pengunjun g	135 Pengunjun g	100%	2 Kali	1 Kali	
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah pemeliharaan baliho	5 Pemeliharaan	30 Pemelihara an	30 Pemelihara an	30 Pemelihara an	100%	5 Pemeliha raan	6 Pemelihara an	
2	18	04			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perizinan yang diterbitkan dalam satu tahun	3918 Izin	98,40%	98,40%	98,40%	100%	3918 Izin	4159 Izin	
2	18	04	2.01		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah penyelesaian izin melalui system OSS dan sistem daerah	2693 Izin	2505 Izin	2505 Izin	2505 Izin	100%	2693 Izin	3376 Izin	
2	18	04	2.01	01		Jumlah izin usaha yang diterbitkan	1500 Izin	1500 Izin	1500 Izin	1500 Izin	100%	1500 Izin	2114 Izin	
2	18	04				Jumlah pelayanan izin penunjang usaha yang diterbitkan	1000 Izin	1500 Izin	1500 Izin	1500 Izin	100%	1000 Izin	1262 Izin	



RENJA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Konsultasi Perizinan dan Nonperizinan penanaman modal	1000 Pelaku usaha	1000 Pelaku usaha	1000 Pelaku usaha	100%	1000 Pelaku usaha	2099 Pelaku Usaha
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Pengendalian Perusahaan yang Berinvestasi	67.53%	36%	36%	100%	67.53%	3%
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Pembinaan Penanaman Modal PMDN dan PMA	12 Bulan	250 Perusahaan	250 Perusahaan	100%	12 Bulan	6 Bulan
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Perusahaan Yang Terpantau Perkembangannya Melalui Pelaksanaan Penanaman Modal	35 Perusahaan	250 Perusahaan	250 Perusahaan	0	35 Perusahaan	10 Perusahaan
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Perusahaan yang Dibina Melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	70 Perusahaan	30 Perusahaan	30 Perusahaan	0	70 Perusahaan	25 Perusahaan
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMA/PMDN yang diawasi	300 Perusahaan	100 Unit	100 Unit	100%	300 Perusahaan	100 Perusahaan
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase Data Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola	3.5%	100%	100%	100%	3.5%	0
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi	63 Perijinan	56 Perijinan dan 7 Non Perijinan	56 Perijinan dan 7 Non Perijinan	100%	63 Perijinan	0
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah penyediaan aplikasi data yang di update	56 Perijinan dan 7 Non Perijinan	56 Perijinan dan 7 Non Perijinan	56 Perijinan dan 7 Non Perijinan	100%	56 Perijinan dan 7 Non Perijinan	0



Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja di atas, disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung oleh 6 program, dimana didalamnya terdiri dari 1 program pendukung dan 5 program utama yang mana target kinerjanya telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target kinerja program yang telah tercapai, meliputi :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - c. Program Promosi Penanaman Modal
 - d. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - f. Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal
2. Untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan memiliki 13 kegiatan yang terdiri dari 7 kegiatan pendukung dan 6 kegiatan utama yang mana target kinerja dari semua kegiatan tersebut telah teralisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah:

- a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
- b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
- c. Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	Prosentase peningkatan realisasi Investasi PMDN	-	-	30%	36%	2.5%	3%	110.55%	133%	1.5%	1.5%	
2	Prosentase peningkatan realisasi Investasi PMA	-	-	1.5%	2%	2.5%	3%	-	-	1.5%	1.5%	Renstra 2021-2026
3	Peningkatan Jumlah Nilai Realisasi Investasi	-	-	199.979.240.975,-	215.362.259.511,-	-	-	364.823.000.000,-	215.362.259.511,-	370.295.345.000	370.295.345.000	Renstra 2016-2021
4	Prosentase Penyelesaian Izin tepat waktu	-	-	98.39%	98.39%	99.47%	99.57%	100%	100%	100%	100%	
5	IKM/SKM	-	-	81.25	81.26	83.22	83.85	88.72	88.80	83.22	83.85	
6	NILAI SAKIP DPMPTSP	-	-	-	-	86.80	86.81	-	-	86.80	86.81	Renstra 2021-2026



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apa bila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu-isu penting Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan adalah :

1. Target peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan yang mencapai 3,55 – 5,43 % per tahun, dengan salah satu tumpuannya adalah peningkatan realisasi investasi.
2. Harapan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan publik pemerintah Kabupaten Lamongan terutama terkait dengan pelayanan perijinan yang tepat waktu.

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman



RENJA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Modal dan Perijinan dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dalam hal ini mengkoordinasikan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang nantinya ditujukan langsung kepada Perangkat Daerah terkait.



Tabel 2.3
Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Lamongan

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator/Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			NIHIL		



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan Terdapat Kebijakan Nasional dan Provinsi

Arah kebijakan dan strategi nasional di bidang penanaman modal dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada agenda pembangunan nasional nomor 1 (satu), **“Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan”**, dengan Sasaran prioritas **“Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian”**. Target yang hendak dicapai dalam rangka “Penguatan Investasi” untuk lima tahun ke depan adalah:

1. Pertumbuhan investasi (PMTB) (%) 8.4 pada tahun 2024.
2. Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (ranking EoDB) yang ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya indikator melalui usaha pada tahun 2024:
(menuju 40)
 - a. Jumlah prosedur 5
 - b. Waktu (hari) 4
3. Nilai realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun) 1500 pada tahun 2024.
4. Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN (%) 49.5 pada tahun 2024.
5. Nilai realisasi PMA dan PMDN industry pengelolaan (Rp Triliun) 782 pada tahun 2024.

Arah Kebijakan :

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun

Visi RPJMD berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Selain itu, secara politisi Visi dapat



dimaknai sebagai cita-cita atau harapan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Idealnya visi dapat menjelaskan arah atau suatu kondisi yang diharapkan dan yang ingin dicapai pada masa depan berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini.

Visi RPJM Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 disusun berdasarkan keselarasan dan harmonisasi dengan arah kebijakan RPJMN tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, RPJPD period eke 4 tahun 2005-2025 dan RTRW Tahun 2020-2039 serta mempertimbangkan dinamika pembangunan di Kabupaten Lamongan maka Visi RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 yakni:

TERWUJUDNYA KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKEADILAN

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- 1) **Terwujudnya** mengandung arti upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka mencapai kejayaan lamongan dan keadilan bagi masyarakat.
- 2) **Kejayaan** adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai Kabupaten yang masyhur, unggul dan maju dalam pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, kebudayaan dan ekonomi yang berbasis potensi unggulan, sehingga terwujud kesejahteraan lahir batin bagi masyarakat.
- 3) **Berkeadilan** adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunannya dan konektivitas pelayanan publik serta meningkat aksesibilitasnya. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan dan kehadiran pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat, sehingga dapat menurunkan kondisi ketimpangan dan kemiskinan.



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2024, “**Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan**” ditempuh melalui lima misi sebagai berikut.

Misi 1.

Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

Fokus dari Misi pertama yakni terwujudnya pertumbuhan yang inklusif. Ekonomi inklusif adalah pertumbuhan yang bisa memberikan dampak positif pada pembangunan dan bisa diakses serta dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat. Representasi ketercapaian atau keberhasilan dari misi ini yakni meningkatnya jumlah investasi, meningkatnya produktifitas sektor unggulan dan pengeluaran wisatawan meningkat. Selain itu, Kemiskinan menurun, kesenjangan mengecil, dan pengangguran berkurang, serta ketahanan ekonomi keluarga dan perempuan terjamin. Selain itu kesejahteraan petani dan penanganan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial mengalami peningkatan.

Misi 2.

Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ke dua Kabupaten Lamongan terfokus pada upaya pemerintah untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Representasi tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yakni semakin meningkatnya pembangunan manusia yang didukung oleh kualitas pelayanan dan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat, kualitas pelayanan dan kemudahan aksesibilitas kesehatan bagi masyarakat, dan semakin meningkatnya kualitas kepemudaan dan prestasi Olahraga.

Misi 3.

Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut:



Fokus Misi tiga yakni Peningkatan Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Infrastruktur. Dalam rangka mewujudkan kepuasan atas kinerja infrastruktur, pemerintah akan fokus pada peningkatan kualitas layanan dan konektivitas infrastruktur yang merata, pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian terhadap resiko bencana.

Misi 4.

Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius-Berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tentram, dengan penjelasan sebagai berikut:

Fokus Misi ke empat yaitu Peningkatan Kesalehan Sosial dan Pelestarian nilai-nilai Kebudayaan bagi Masyarakat. Reppresentasi ketercapaiannya yakni meningkatnya pemahaman masyarakat tentang sikap toleran, solidaritas sosial V-6 dan stabilitas ketentraman dan ketertiban lingkungan serta menjaga nilai-nilai budaya lokal.

Misi 5.

Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi, dengan penjelasan sebagai berikut :

Fokus misi ke lima adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berkualitas. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan adalah Terciptanya Reformasi Birokrasi yang didukung oleh peningkatan inovasi layanan berbasis digital, profesionalitas aparatur, akuntabilitas kinerja pemerintahan, dan desa mandiri.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 1 (satu) dan Misi 5 (lima) dan Tujuan 1 (satu) dari RPJMD Kabupaten Lamongan.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah serta mengacu pada tujuan dan



sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2024, yaitu :

Tujuan

1. Meningkatkan Realisasi Investasi (Misi 1)
Indikator :Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi
2. Meningkatkan Layanan Publik yang Inovatif (Misi 5)
Indikator :Nilai IKM/SKM

Sasaran

1. Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah baik PMDN maupun PMA(Misi 1)
Indikator :
 - Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMDN
 - Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA
 - Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu
2. Meningkatnya Pelayanan Perijinan (Misi 5)
Indikator :
 - SKM
 - Nilai SAKIP

Target tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tujuan Dan Sasaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lamongan**

TUJUAN	SASARAN		2022	KONDISI AKHIR
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
1	2	3	11	12
Meningkatkan Efektifitas Investasi	Meningkatnya realisasi Investasi Daerah Baik PMDN maupun PMA	1. Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMDN	1.5%	1.5%
		2. Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA	1.5%	1.5%



		3. Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	99.47%	99.57%
Meningkatkan pelayanan publik yang inovatif	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	SKM	83.22	83.22
	Nilai SAKIP DPMPTSP	Nilai SAKIP	86.80	86.80

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan

Rumusan rencana perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2022 adalah terdiri dari 6 program dengan 13 Kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.251.784.083,- (Enam Milyard Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah) adapun rincian program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub kegiatan :
 - Penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub kegiatan :
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulnan, Triwulan/ Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi umum
Sub kegiatan :
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- II. Program pengembangan iklim penanaman modal**
 - 1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Inisiatif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten atau Kota
 - Sub kegiatan :
 - Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - 2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota
- III. Program Promosi Penanaman Modal**
 - 1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota



Sub kegiatan :

- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

IV. Program Pelayanan Penanaman Modal

1. Kegiatan Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota

Sub kegiatan :

- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Strategis Secara Elektronik
- Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

VI. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

Sub kegiatan :

- Pengolahan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik



Rencana kerja dan pendanaan tahun 2022 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026, yaitu **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”** ditempuh melalui lima misi. Oleh karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi Ke 1 (Satu) yaitu “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan Daerah”, dan Misi Ke 5 (Lima) yaitu “Menghandirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi”.

Selaku Perangkat Daerah penunjang bidang Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dalam mendukung Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.



Tabel 3.1
RUMUSAN PERUBAHAN POROGAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

Nomor Rekening		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Penggeseran Alokasi Anggaran			Keterangan
1		2		3		4		5		6			
				Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang	
2	18												
2	18	01	1	Prosentase terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,78%	Prosentase terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,78%	6.251.784.083	7.325.784.083	6.251.784.083	7.325.784.083	1.074.000.000	
2	18	01		Prosentase terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,78%	Prosentase terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,78%	4.825.390.083	5.927.260.083	4.825.390.083	5.927.260.083	999.000.000	
2	18	01	2.01	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	
2	18	01	2.01	Jumlah dokumen perencanaan Renstra dan Renja	3 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan Renstra dan Renja	3 dokumen	DPM PTSP	DPM PTSP	15.000.000	15.000.000	0	
2	18			Jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen	DPM PTSP	DPM PTSP				
2	18	01	2.01	Jumlah dokumen evaluasi	1 dokumen	Jumlah dokumen evaluasi	1 dokumen	DPM PTSP	DPM PTSP	15.000.000	15.000.000	0	
2	18	01	2.02	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	7 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	7 Laporan	3.245.771.988	3.870.771.988	3.245.771.988	3.870.771.988	625.000.000	
2	18	01	2.02	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan ASN	27 org	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	27 org	DPM PTSP	DPM PTSP	3.215.771.988	3.840.771.988	625.000.000	



RENJA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	01	2.02	06	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja	1 dokumen	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja	1 dokumen	DPM PTSP	DPM PTSP	15.000.000	15.000.000	0	
						Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	3 dokumen	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	3 dokumen	DPM PTSP	DPM PTSP				
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/kuartalan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja realisasi kinerja akhir tahun	1 dokumen	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja realisasi kinerja semesteran akhir tahun	1 dokumen	DPM PTSP	DPM PTSP	15.000.000	15.000.000	0	
2	18	01	2.06		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi kepegawaian yg dipenuhi	2 Administrasi asil	Jumlah Administrasi kepegawaian yg dipenuhi	2 Administrasi asil	DPM PTSP	DPM PTSP	50.000.000	50.000.000	0	
2	18	01	2.06	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	56 Stel	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	56 Stel	DPM PTSP	DPM PTSP	25.000.000	25.000.000	0	
2	18	01	2.06	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	5 orang	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	5 orang	DPM PTSP	DPM PTSP	25.000.000	25.000.000	0	
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang dipenuhi	6 Administrasi asil	Jumlah Administrasi Umum yang dipenuhi	6 Administrasi asil	DPM PTSP	DPM PTSP	200.000.000	200.000.000	0	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat Listrik dan elektronik	22 item	Jumlah alat Listrik dan elektronik	22 item	DPM PTSP	DPM PTSP	20.000.000	20.000.000	0	
2	18	01	2.06	03	Penyediaan perabotan Rumah tangga	Jumlah Perabotan Rumah Tangga yang dipenuhi	6 Jenis	Jumlah Perabotan Rumah Tangga yang dipenuhi	6 Jenis	DPM PTSP	DPM PTSP	20.000.000	20.000.000	0	
2	18	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	4 Jenis	Jumlah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	4 Jenis	DPM PTSP	DPM PTSP	50.000.000	50.000.000	0	
2	18	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	5 Jenis	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	5 Jenis	DPM PTSP	DPM PTSP	40.000.000	40.000.000	0	



RENJA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	8 media	Jumlah bahan bacaan	8 media	DPM PTSP	DPM PTSP	20.000.000	20.000.000	0	
2	18	01	2.06	06	Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	62 Perjalanan	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	62 Perjalanan	DPM PTSP	DPM PTSP	50.000.000	50.000.000	0	
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah makan dan minum	5 Jenis	Jumlah makan dan minum	5 Jenis	DPM PTSP	DPM PTSP				
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubeler	4 set	Jumlah pengadaan meubeler	4 set	DPM PTSP	DPM PTSP	100.000.000	325.000.000	225.000.000	
2	18	01	2.07	06	Penyediaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan perlengkapan kantor: komputer, notebook, printer	1 Software	Jumlah pengadaan peralatan perlengkapan kantor: komputer, notebook, printer	1 Software	DPM PTSP	DPM PTSP	175.000.000	175.000.000	100.000.000	
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	DPM PTSP	DPM PTSP	1.148.618.095	1.148.618.095	24.000.000	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yg dibayar	4 rekening	Jumlah rekening yg dibayar	4 rekening	DPM PTSP	DPM PTSP	373.132.095	373.132.095	0	
2	18	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa perlengkapan dan peralatan kantor	3 Jenis	Jumlah jasa perlengkapan dan peralatan kantor	3 Jenis	DPM PTSP	DPM PTSP	14.050.000	14.050.000	0	
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi	16 Orang	Jumlah tenaga administrasi	16 Orang	DPM PTSP	DPM PTSP	758.736.000	782.736.000	24.000.000	
						Jumlah tenaga kebersihan, pengamanan, petugas parkir dan pengemudi	11 Orang	Jumlah tenaga kebersihan, pengamanan, petugas parkir dan pengemudi	11 Orang	DPM PTSP	DPM PTSP				



RENJA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Barang yang dipelihara	4 Jenis	Jenis Barang yang dipelihara	4 Jenis	DPM PTSP	DPM PTSP	157.000.000	282.000.000	125.000.000	
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	2 Unit	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	2 Unit	DPM PTSP	DPM PTSP	37.000.000	37.000.000	0	
						Jumlah Motor Jabatan yang dipelihara	2 Unit	Jumlah Motor Jabatan yang dipelihara	2 Unit	DPM PTSP	DPM PTSP				
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	3 Unit	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	3 Unit	DPM PTSP	DPM PTSP	25.000.000	25.000.000	0	
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dipelihara	20 Unit	Jumlah peralatan dipelihara	20 Unit	DPM PTSP	DPM PTSP	45.000.000	45.000.000	0	
						Jumlah perlengkapan yang dipelihara	20 Unit	Jumlah perlengkapan yang dipelihara	20 Unit	DPM PTSP	DPM PTSP				
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yg dipelihara	2 gedung	Jumlah gedung yg dipelihara	2 gedung	DPM PTSP	DPM PTSP	50.000.000	175.000.000	125.000.000	
2	18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Prosentase peningkatan minat Investor	1,5%	Prosentase peningkatan minat Investor	1 dokumen	DPM PTSP	DPM PTSP	75.000.000	75.000.000	0	
2	18	02	2.01		Pentapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten atau Kota	Jumlah Fasilitas / Insentif Penanaman Modal	35 %	Jumlah Fasilitas / Insentif Penanaman Modal	3 dokumen	DPM PTSP	DPM PTSP	25.000.000	25.000.000	0	
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen Pemberian Fasilitas/Insentif PM	1 Dokumen	Laporan Evaluasi Pemberian Fasilitas / Insentif dibidang Penanaman Modal	1 dokumen	DPM PTSP	DPM PTSP	25.000.000	25.000.000	0	



RENJA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi	35%	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi	35%	DPM PTSP	DPM PTSP	50.000.000	50.000.000	0	
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Jumlah Peta Data Potensi Investasi yang dikembangkan	1 Updating Database	Jumlah Peta Data Potensi Investasi yang dikembangkan	1 Updating Database	DPM PTSP	DPM PTSP	50.000.000	50.000.000	0	
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	1,5%	Prosentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	1,5%	DPM PTSP	DPM PTSP	235.000.000	235.000.000	0	
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	2 Kegiatan	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	2 Kegiatan	DPM PTSP	DPM PTSP	235.000.000	235.000.000	0	
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Strategi Penanaman Modal	1 Dokumentasi/film	Jumlah Dokumen Strategi Penanaman Modal	1 Dokumentasi/film	DPM PTSP	DPM PTSP	37.540.000	37.540.000	0	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi	2 Kali	Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi	2 Kali	DPM PTSP	DPM PTSP	197.460.000	197.460.000	0	
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Penyelenggaraan Balho	5 Pemeliharaan	Jumlah Penyelenggaraan Balho	5 Pemeliharaan						
2	18	04				Jumlah Perizinan yang Diterbitkan Dalam Satu Tahun	3692	Jumlah Perizinan yang Diterbitkan Dalam Satu Tahun	3692	DPM PTSP	DPM PTSP	585.000.000	585.000.000	75.000.000	
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyelesaian Izin Melalui Sistem OSS dan Sistem Daerah	2538 Izin	Jumlah Penyelesaian Izin Melalui Sistem OSS dan Sistem Daerah	2538 Izin	DPM PTSP	DPM PTSP	585.000.000	585.000.000	75.000.000	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin usaha yang diterbitkan	1500 Izin	Jumlah izin usaha yang diterbitkan	1500 Izin	DPM PTSP	DPM PTSP	585.000.000	585.000.000	75.000.000	



RENJA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

						Jumlah pelayanan izin prurujang usaha yang diberikan	1000 Izin	Jumlah pelayanan izin prurujang usaha yang diberikan	1000 Izin	DPM PTSP	DPM PTSP				
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Konsultasi Perizinan dan NonPerizinan Penanaman Modal	1000 Pelaku usaha	Konsultasi Perizinan dan NonPerizinan Penanaman Modal	1000 Pelaku usaha	DPM PTSP	DPM PTSP	20.000.000	20.000.000	0	
2	18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Pengendalian Perusahaan yang Berinvestasi	90%	Prosentase Pengendalian Perusahaan yang Berinvestasi	90%	DPM PTSP	DPM PTSP	443.394.000	443.394.000	0	
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN	12 Bulan	Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN	12 Bulan	DPM PTSP	DPM PTSP	443.394.000	443.394.000	0	
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Perusahaan Yang Terantau Perkembangannya Melalui Pelaksanaan Penanaman Modal	35 Perusaa n	Jumlah Perusahaan Yang Terantau Perkembangannya Melalui Pelaksanaan Penanaman Modal	35 Perusaa n	DPM PTSP	DPM PTSP	25.000.000	25.000.000	0	
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Perusahaan yang Dibina Melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	70 Perusaa n	Jumlah Perusahaan yang Dibina Melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	70 Perusaa n	DPM PTSP	DPM PTSP	25.000.000	25.000.000	0	
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMA/PMDN yang diawasi	300 Perusaa n	Jumlah PMA/PMDN yang diawasi	300 Perusaa n	DPM PTSP	DPM PTSP	363.394.000	363.394.000	0	



RENJA PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

1	18	06	01	01	PROGAM PENGLOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	1,5%	Presentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	1,5%	DPM PTSP	50.000.000	50.000.000	0
2	18	06	2.01	01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi	56 Perijinan dan 7 Non Perijinan	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi	56 Perijinan dan 7 Non Perijinan	DPM PTSP	50.000.000	50.000.000	0
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Penyediaan Aplikasi Data yang di Update	56 Perijinan dan 7 Non Perijinan	Jumlah Penyediaan Aplikasi Data yang di Update	56 Perijinan dan 7 Non Perijinan	DPM PTSP	50.000.000	50.000.000	0

Lamongan, Juli 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN





BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja Perubahan Dinas Kabupaten Lamongan adalah Program Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan tugas pokok fungsi dan sasaran Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan

RENJA Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022, RENJA Perubahan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Lamongan. RENJA Perubahan juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lamongan Tahun 2021, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat Kebijakan dan Program/ Kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Disamping itu RENJA berfungsi untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (RENJA DPMPTSP) Kabupaten Lamongan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Lamongan. Program dan Kegiatan pada Renja Perubahan 2021 ini mengacu pada Program dan Kegiatan dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Lamongan tahun terahir serta mengevaluasi Program dan Kegiatan yang telah berjalan pada tahun sebelumnya.

Rencana Kerja (Renja 2022) disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menggambarkan **pencapaian Rencana Strategi**, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif. Melalui Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program /kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

Lamongan, Juli 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAOMONGAN



PUJO BROTO IRAWAN PUTRA, SE.,MM.,M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19691008 199503 1 003